

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH  
DAERAH, LEVERAGE, DANA  
PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2015 - 2017)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

**MOH. SIRRIL WAFA**

**B 200 140 362**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”  
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MOH. SIRRIL WAFA

B 200 140 362

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Pembimbing



Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA.

NIDN. 0624026901

HALAMAN PENGESAHAN

**“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

**(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017)**

Yang ditulis oleh :

**MOH. SIRRIL WAFA**  
**B 200 140 362**

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 25 Oktober 2018  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Dra. Rina Trisnawati, M.Si., Akt., Ph.D., CA. (  )  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Mujiyati, M.Si., Ak. (  )  
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si. (  )  
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Svamsudin, M.M.**  
**NIDN. 0017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2018



Penulis

**MOH. SIRRIL WAFA**  
**B200 140 362**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2017)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2015-2017. Pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 105 sampel data selama 3 tahun periode pengamatan berturut-turut. Setelah data mengalami outlier sebanyak 2 data sehingga total sampel yang diteliti mengalami penurunan menjadi 103 data. Data sampel yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 20 dengan menggunakan uji asumsi klasik, Kemudian dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dan analisis uji statistik. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa penelitian dengan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, leverage, dana perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Daerah

**Abstract**

This study aims to provide empirical evidence about the influence of a real estate income , size of local government, leverage, balance fund and capital expenditure to the financial performance of local governments in district/city area in Central Java Province in 2015-2017. The population in this study is the local government in Central Java Province in 2014-2017 which consists of 29 regencies and 6 cities that have realization data of regional expenditure budget (APBD) for the period of 2015-2017. The sample of this study was taken by using purposive sampling and obtained a sample of 105 data samples during 3 years of observation. After doing 2 data outliers the total sample of this study reduced to 103 data. The collected data were analyzed using the classic assumption test, then tested the hypothesis using multiple linear regression analysis method and statistical test. The results of this study shows that real estate income, influences to the financial performance of local governments, while size of local government, leverage, balance fund and capital expenditure have no any influence to the financial performance of local governments.

**Keywords :** Local government financial performance, real estate income, size of local government, leverage, balance fund, capital expenditure

## **1. PENDAHULUAN**

Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016). Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggung jawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Junarwati *et al* 2013). Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016).

Pemerintah daerah ataupun provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai wewenang penuh untuk meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendanaan dan penghasilan dari pendapatan daerah dalam meningkatkan APBD, apabila pemerintah daerah masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan mengharapkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena belanja aparaturnya belum dapat dibiayai oleh diri sendiri. Kemakmuran suatu negara atau daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah yang tercipta berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai tambah yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah, infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD dan

*intergovernmental revenue* juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut (Simanullang, 2013).

Halim (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri. kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Armaja *et al* (2015) yang berjudul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan dua variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah dan leverage. Perbedaan selanjutnya terletak pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penelitian dan waktu penelitian tahun 2015-2017.

## **2. METODE**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang ada di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2017. Pengambilan data sampel sebanyak 35 pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang mempunyai laporan realisasi anggaran dan laporan neraca pada tahun 2014-2017.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Simanullang (2013) konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk

mencapai output tertentu. Penghitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Simanullang, 2013) yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total realisasi Penerimaan}} \quad (1)$$

Simanullang (2013) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Proksi variabel dalam penelitian ini yang diukur dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah} \quad (2)$$

Proksi dalam variabel ukuran pemerintah daerah pada penelitian ini menggunakan total aset. Total aset dapat diperoleh dalam laporan keuangan pemerintah daerah pada bagian neraca daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), peneliti menggunakan total aktiva dalam mengukur ukuran. Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aktiva lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar (Sari, 2016).

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = (\text{Total Aset}) \quad (3)$$

*Debt to Equity Ratio* (DER) atau rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan antara total utang daerah dengan total aset daerah. Hasil yang didapat akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang (Sari, 2015).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aser}} \quad (4)$$

Dana Perimbangan adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Simanullang, 2013). *Intergovernmental revenue* dikenal dengan dana perimbangan (Simanullang, 2013). Pengukuran ini dipilih karena



*intergovernmental revenue* (IGR) merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal bukan pajak.

Untuk menentukan tingkat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis statistik digunakan model analisis dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dalam rumus:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 UPD + \beta_3 LEV + \beta_4 DP + \beta_5 BM + \varepsilon \quad (5)$$

Keterangan

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

PAD = Pendapatan Asli Daerah

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah

LEV = *Leverage*

DP = Dana Perimbangan

BM = Belanja Modal

$\varepsilon$  = *error*

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengujian Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	103	0,15	1,49	0,3233	0,17625
UPD	103	1,62	28,79	3,6223	3,40305
LEVERAGE	103	0,00	0,08	0,0083	0,01150
DP	103	0,46	1,94	1,1990	0,34778
BM	103	0,05	1,03	0,3683	0,15999
KKPD	103	0,01	0,46	0,0895	0,07641

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

#### 3.2 Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov (K-S). Hasil pengujian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	KETERANGAN
<i>Unstandardized Residual</i>	1,347	0,057	Data Terdistribusi Normal

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* diperoleh sebesar 0.057, sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Glejser. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

VARIABEL	<i>Sig.</i>	KETERANGAN
PAD	0,206	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
UPD	0,461	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
<i>LEVERAGE</i>	0,627	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DP	0,867	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
BM	0,367	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil output uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji Glejser, semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas, karena mempunyai nilai *sig* lebih besar dari 0,05.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin-Watson</i>	Ketentuan	Kesimpulan
1,718	$-2 < DW < 2$	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil output uji autokorelasi diketahui nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,718 yang berada diantara -2 dan 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian ini untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

VARIABEL	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	KETERANGAN
PAD	0,139	0,194	Tidak Terjadi Multikolinearitas
UPD	0,151	0,641	Tidak Terjadi Multikolinearitas
<i>LEVERAGE</i>	0,877	0,140	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DP	0,431	0,318	Tidak Terjadi Multikolinearitas
BM	0,379	0,641	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model atau variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T	Sig	KETERANGAN
Konstanta	0,047	1,82	0,072	
PAD	0,252	2,341	0,021	H <sub>1</sub> Diterima
UPD	-0,003	-0,598	0,551	H <sub>2</sub> Ditolak
<i>Leverage</i>	0,034	0,051	0,959	H <sub>3</sub> Ditolak
DP	-0,021	-0,679	0,498	H <sub>4</sub> Ditolak
BM	-0,005	-0,071	0,944	H <sub>5</sub> Ditolak

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

$$KKPD = 0,047 + 0,252 \text{ PAD} - 0,003 \text{ UPD} + 0,034 \text{ LEVERAGE} - 0,021 \text{ DP} - 0,005 \text{ BM} + \epsilon \quad (6)$$

Simanullang (2013) Uji t (Uji Parsial) merupakan pengujian statistik untuk menguji regresi berganda secara individu yaitu masing-masing variabel independen terhadap variabel bebas. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji t

VARIABEL	<i>t</i> <sub>hitung</sub>	<i>t</i> <sub>tabel</sub>	Sig.	KETERANGAN
PAD	2,341	1,985	0,021	H <sub>1</sub> Diterima
UPD	-0,598	1,985	0,551	H <sub>2</sub> Ditolak
<i>Leverage</i>	0,051	1,985	0,959	H <sub>3</sub> Ditolak
DP	-0,679	1,985	0,498	H <sub>4</sub> Ditolak
BM	-0,071	1,985	0,944	H <sub>5</sub> Ditolak

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Uji F atau uji secara bersama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji secara bersama ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama berpengaruh terhadap variabel terikat. Hasil pengujian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji F

Fhitung	Ftabel	sig
4,027	2,31	0,002

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 8 diatas menunjukkan hasil perhitungan dengan SPSS 20.0 diperoleh  $F_{hitung}$  (4,027) lebih besar dari  $F_{tabel}$  (2,31). Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar (0,002) lebih kecil dari 0,05, maka model diatas sudah tepat (*goodness of fit*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, *leverage*, dana perimbangan dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
415 <sup>a</sup>	0,172	0,129	0,0713

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $Adj R^2$ ) sebesar 0,129. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, *leverage*, dana perimbangan dan belanja modal menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,9% dan sisanya sebesar 87,1% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain diluar model.

### 3.4 Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,021) lebih kecil dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (2,341) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,985) maka  $H_1$  diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hal ini dapat mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai sig sebesar (0,551) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (-0,598) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985) maka  $H_2$  ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa peran dari total aset belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* menunjukkan nilai sig sebesar (0,959) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (0,051) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985) maka  $H_3$  ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Hal ini disebabkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan menunjukkan nilai sig sebesar (0,498) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (-0,679) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985) maka  $H_4$  ditolak, yang artinya variabel dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya dana perimbangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah, hal ini dikarenakan pemerintah daerah kabupaten/kota belum dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat dengan baik..

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal menunjukkan nilai sig sebesar (0,944) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (-0,071) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985) maka  $H_5$  ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan bahwa harapan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara mengalokasikan pada belanja modal tidak efektif.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut: Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,021) lebih kecil dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (2,341) lebih besar dari  $t_{tabel}$  (1,985), Variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,551) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (-0,598) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985), Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,959) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (0,051) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985), Variabel dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,498) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (-0,679) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985), Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kelima ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,944) lebih besar dari 0,05 dan/atau  $t_{hitung}$  (-0,071) lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (1,985).

##### **4.2 Keterbatasan Penelitian**

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen sehingga hasil penelitian ini belum

dapat menggambarkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen, Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya sebatas pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah, sehingga belum dapat mewakili seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

### **4.3 Saran**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: Bagi pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja keuangan daerah melalui potensi dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, serta mampu mengelola dana perimbangan, total aset, belanja modal, leverage (utang) dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah, Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah periode tahun pengamatan tidak hanya 3 tahun sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif, Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder saja, hendaknya melakukan wawancara atau konfirmasi secara langsung pada daerah yang menjadi objek penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Bagian Selatan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara.
- Andirfa *et al.* 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164. Volume.5 No.3 : 30- 38
- Budianto, Alexander. 2016. Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA Vol.4 No.4 : 844-851.
- Junarwati *et al.* 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2010-2012. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 : 186-193.

- Kusuma, A. R., & Handayani, N. 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 6 No. 1, 2460-0585.
- Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE YOGYAKARTA
- Maiyora. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera). Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Masdiantini, Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.2. ISSN: 2302-8556.
- Minarsih, R. (2015). Pengaruh size, wealth, leverage, dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Skripsi. Universitas Negeri Semarang).
- Muhayanah. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyani, Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmentalrevenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). Universitas Muhammadiyah Purwokerto. *KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1.
- Novianti *et al.* 2016. Pengaruh Ukuran Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah DaerahKabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. *E-Jurnal Bunchhatta* Volume 9, No 1.
- Purwasih. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2011–2016). Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Pasal 79 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah.



- Republik Indonesia. 2003. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Pasal 1 Undang Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 No. 2. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* Vol.2 No.2 : 138-15.
- Sari. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). Faculty of Economics Riau University. Pekanbaru. *JOM Fekon* Vol 3 No 1.
- Sesotyaningtyas. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 1 (1) (2012). ISSN 2252-6765.
- Simanullang. 2013. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. Fakultas Ekonomi – Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. *Umrah Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 1 : 1-24.
- Sudarsana dan Rahardjo. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13.
- Sugiyono dan Agus. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS dan Lisler: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.